



PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA PENGEMBANGAN KAWASAN OBJEK WISATA HUTAN MANGROVE KELURAHAN KLAWALU KOTA SORONG

THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN EFFORTS TO DEVELOP THE MANGROVE FOREST TOURISM OBJECT AREA KLAWALU SUB-DISTRICT SORONG CITY

Junita Erni A. C. Krisifu dan Maya Pattiwael*

Program Studi Kehutanan Fakultas Ilmu Pertanian dan Lingkungan
Universitas Victory Sorong

Corresponding Author e-mail : mayapattiwael@gmail.com

ABSTRAK

Kawasan mangrove yang berada di Kelurahan Klawalu Kota Sorong, dikelola atas kerjasama dari Dinas Pariwisata Kota Sorong dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Sorong, dalam hal pengembangan objek wisata dan juga perlindungan ekosistem mangrove di lokasi tersebut secara keseluruhan. Oleh karena itu, peran dari pemerintah sangat diperlukan dalam menjaga potensi ekowisata dengan tetap memperhatikan aspek ekologinya. Penelitian dilaksanakan pada kawasan Objek Wisata Hutan Mangrove Kelurahan Klawalu Kota Sorong pada bulan Mei sampai Agustus 2021. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan menjelaskan peran Pemerintah Daerah serta faktor pendukung dan penghambat pengembangan objek wisata di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah berperan dalam pengembangan objek wisata mangrove di Klawalu dilakukan melalui perencanaan pariwisata, pembangunan pariwisata, peraturan pariwisata dan Pemerintah juga bertindak sebagai fasilitator. Ada 4 faktor yang menjadi pendukung pengembangan objek wisata mangrove Klawalu berupa adanya kerja sama dan upaya promosi, daya tarik wisata, sumber daya manusia, tersedianya fasilitas dan aksesibilitas. Sementara itu, faktor-faktor yang menjadi penghambat berupa keterbatasan anggaran, perilaku masyarakat yang masih merusak lingkungan dan belum adanya penerapan sanksi.

Kata Kunci : Peran pemerintah, Mangrove, Objek wisata, Klawalu

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Mangrove merupakan ekosistem pesisir paling penting bagi kehidupan di sekitarnya, seperti memelihara

produktivitas perairan pesisir maupun didalam menunjang kehidupan di wilayah tersebut (Mudjab, 2017). Selain itu, hutan mangrove juga mempunyai berbagai keragaman



potensi yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bisa dirasakan baik oleh masyarakat yang tinggal di dekat kawasan hutan mangrove maupun masyarakat yang tinggal jauh dari kawasan hutan mangrove (Kustanti, 2011 dalam Sondakh, Suhaeni dan Lumenta, 2019).

Berdasarkan data dari bagian Humas Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia (2020), luas mangrove di Indonesia mencapai 3,49 Juta Ha, namun 52% atau 1,82 juta Ha mangrove Indonesia dalam kondisi rusak. Menurut Anwar (dalam Mudjab, 2017), ada tiga faktor utama penyebab kerusakan mangrove, yaitu: (1) Pencemaran, (2) Konversi hutan mangrove yang kurang memperhatikan faktor lingkungan (konversi ekosistem mangrove menjadi tambak merupakan faktor utama penyebab hilangnya hutan mangrove di dunia), dan (3) Penebangan yang berlebihan. Agar kerusakan mangrove tidak semakin meluas maka sudah seharusnya Pemerintah meningkatkan upaya perlindungan atau konservasi

hutan mangrove itu sendiri. Jasa lingkungan yang memiliki peluang untuk dikembangkan dan tidak beresiko merusak ekosistem hutan mangrove yaitu dari sektor pariwisata.

Sektor pariwisata dapat dikatakan memiliki potensi untuk dikembangkan guna menambah pendapatan daerah setempat. Salah satu daerah di Provinsi Papua Barat yang terusmengembangkan potensi pariwisatanya adalah Kota Sorong. Kota Sorong ini terletak pada kawasan pesisir pantai sehingga sebagian besar masyarakatnya beraktivitas dengan memanfaatkan sumberdaya alam pesisir berupa mangrove yang digunakan untuk berbagai kepentingan seperti bahan bangunan dan kayu bakar (Tabalessy, 2014). Lebih lanjut disampaikan oleh Tabalessy dalam penelitiannya bahwa ekosistem mangrove di Kota Sorong mengalami penurunan dari tahun ke tahun, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi sangat rendah, kurangnya kegiatan monitoring, tidak efektifnya kegiatan konservasi dan tidak efektifnya kegiatan pemantauan pemanfaatan dan pengelolaan hutan mangrove.

Kawasan mangrove yang berada di



Kelurahan Klawalu Kota Sorong, dikelola atas kerjasama dari Dinas Pariwisata Kota Sorong dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Sorong, dalam hal pengembangan objek wisata dan juga perlindungan ekosistem mangrove di lokasi tersebut secara keseluruhan. Kawasan mangrove ini dijadikan sebagai lokasi objek wisata dan resmi ditetapkan pada bulan Mei 2019. Pengelolaan dan pengembangan hutan mangrove sebagai lokasi objek wisata ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang diwakili oleh kedua instansi tersebut memberikan dampak baik dari segi ekologi, ekonomi maupun sosial. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh dari Dinas Pariwisata Kota Sorong bahwa untuk mendapatkan izin penggunaan lokasi, mereka juga bekerja sama dengan pemilik hak ulayat untuk menyiapkan lahan yang mereka miliki, sehingga keuntungan yang diperoleh akan dibagikan juga kepada pemilik hak ulayat tersebut. Untuk mencegah terjadinya perusakan mangrove di kawasan ini maka Pemerintah sengaja membuat beberapa papan peringatan, himbauan, bahkan penjelasan tentang kawasan wisata mangrove seperti fungsi hutan mangrove disertai dengan

jenis-jenisnya, yang bertujuan memberikan pembelajaran secara tidak langsung kepada setiap pengunjung yang datang atau masyarakat yang melewati lokasi ini. Pengelolaan dan pemantauan harus rutin dilakukan karena tidak selamanya ekosistem mangrove itu dalam kondisi yang baik. Oleh karena itu, peran dari pemerintah sangat diperlukan dalam menjaga potensi ekowisata untuk dapat menjangkau perekonomian masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan ekowisata khususnya pada hutan mangrove Kota Sorong dengan tetap memperhatikan aspek ekologinya.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Mei sampai Agustus 2021, pada kawasan Objek Wisata Hutan Mangrove Kelurahan Klawalu Kota Sorong.

Alat dan Objek Penelitian

Alat yang digunakan berupa alat tulis, kamera, alat perekam dan panduan wawancara. Objek penelitian adalah kawasan wisata hutan mangrove di Kelurahan Klawalu Kota Sorong.



Pengambilan Sampel

Pemilihan responden sebagai sampel penelitian dilakukan dengan metode *purposive sampling*, dengan pertimbangan bahwa responden yang dipilih yaitu yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengelolaan dan pengembangan hutan mangrove di Kelurahan Klawalu Kota Sorong. Oleh karena itu, diperoleh 2 instansi yang sesuai dengan criteria dimaksud yaitu Dinas Pariwisata Kota Sorong dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Sorong.

Analisis data

Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dengan menjelaskan tentang peran Pemerintah Daerah serta faktor pendukung dan penghambat pengembangan objek wisata hutan mangrove di Kelurahan Klawalu Kota Sorong.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Objek Wisata

Berdasarkan hasil wawancara terhadap responden, diketahui bahwa pemerintah yang diwakili oleh Dinas Pariwisata Kota Sorong dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Sorong

memiliki peran yang besar dalam pengembangan objek wisata mangrove di Klawalu baik untuk tempat wisatanya maupun perlindungan lingkungan yaitu dalam menjaga kawasan mangrove itu agar fungsinya dapat berjalan dengan baik. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam pengembangan objek wisata mangrove di Klawalu melalui:

1. Melakukan perencanaan pariwisata

Kawasan mangrove merupakan kawasan yang menjadi titik fokus Dinas Lingkungan Hidup Kota Sorong karena fungsi mangrove itu sendiri yang bisa mendukung kemajuan perlindungan kawasan. Sejak awal pengelolaan mangrove hanya dilihat dari segi perlindungan atau lingkungan. Seiring dengan perkembangan minat wisata maka dilakukan koordinasi dan komunikasi untuk dikembangkan menjadi lokasi objek wisata. Dengan melihat peluang yang ada, Dinas Pariwisata juga melakukan perencanaan pembangunan kawasan wisata mangrove Klawalu Kota Sorong yang diawali dengan pemilihan lokasi (tahun 2017), pelepasan tanah



adat, pengajuan dan pencairan anggaran dari pemerintah pusat, kegiatan adat dan peletakan batu pertama (tahun 2018) dan berakhir dengan peresmian Taman Wisata Mangrove Klawalu (tahun 2019). Dalam perencanaan yang dilakukan tentu juga dipertimbangkan beberapa hal seperti menyediakan berbagai fasilitas pendukung yang tentunya akan menarik minat wisatawan atau pengunjung ke lokasi yang disediakan, promosi dan juga pertimbangan tentang aksesibilitas menuju kawasan wisata ini.

2. Pembangunan Pariwisata

Dinas Pariwisata Kota Sorong telah melakukan pengembangan dengan membangun beberapa fasilitas seperti *tracking* sepeda, gasebo, gapura identitas, ruang ganti/toilet, menara pandang, jalan setapak bagi pejalan kaki, kafe, beberapa spot-spot atau tempat foto, tempat cinderamata, 8 buah *homestay*, tempat parkir bahkan beberapa papan pengumuman, larangan dan peraturan juga dipasang pada lokasi wisata. Dari hasil penelitian di lapangan terlihat bahwa

fasilitas yang disediakan itu dalam kondisi yang sangat baik dan pengunjung merasa puas ketika memanfaatkan semua fasilitas yang disediakan. Dengan semakin berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), maka upaya promosi dilakukan melalui media sosial dengan bekerja sama dengan anak-anak pemuda kelompok sadar wisata dan juga hotel-hotel yang ada di Kota Sorong. Hal ini sangat efektif karena pengunjung yang datang bukan hanya wisatawan lokal tapi juga dari mancanegara seperti Amerika dan Inggris.

Menurut Kepala Seksi Rekreasi dan Hiburan pada Dinas Pariwisata Kota Sorong (Bapak Santoso), pemerintah hanya membantu dalam melakukan pembangunan yang ditujukan untuk masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat harus ikut menjaga tempat wisata tersebut agar semakin berkembang karena tentunya akan berpengaruh juga pada perekonomian masyarakat sekitar kawasan wisata hutan mangrove. Penataan lokasi untuk masyarakat berjualan rencananya akan dimulai dari jalan masuk kawasan wisata



sampai tempat wisata. Hal ini dilakukan untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian keluarganya.

3. Peraturan Pariwisata

Dinas Pariwisata memiliki peraturan tertulis yang dikeluarkan oleh Walikota Sorong berupa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Hutan Mangrove di Kawasan Muara Sungai dan Pantai Dalam Wilayah Kota Sorong. Selain itu, terkait pemungutan biaya retribusi atau biaya masuk ke dalam kawasan wisata, dikeluarkan juga Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Kawasan Wisata. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, biaya masuk untuk anak-anak wajib membayar Rp.5.000,-/anak dan untuk orang dewasa wajib membayar Rp.10.000,-/orang. Untuk penggunaan tempat parkir, pengunjung yang menggunakan kendaraan roda 2 diwajibkan membayar sebesar Rp.2000,-/kendaraan, roda 4 membayar Rp.5.000,-/kendaraan, roda 6 membayar Rp. 10.000,-/kendaraan

dan semuanya berlaku untuk sekali parkir. Bagi masyarakat yang akan melakukan *Prewedding* di lokasi tersebut maka wajib membayar Rp.500.000, untuk pembuatan film membayar Rp. 1.000.000,- dan bagi yang ingin melakukan penelitian membayar Rp.50.000,-.

Terkait dengan masalah sanksi terhadap pelanggaran atau kerusakan yang disebabkan masyarakat khususnya dalam hal kerusakan hutan mangrove, sampai saat ini hanya masih dalam tahap pembinaan untuk merubah cara pandang atau berpikir masyarakat. Masyarakat mengambil atau menebang mangrove untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup mereka atau terkait dengan perekonomiannya. Dalam Undang-undang maupun Peraturan Daerah memang sudah ditetapkan sanksinya namun untuk saat ini pemerintah lebih fokus kepada pembinaan untuk membangun kesadaran masyarakat dengan juga mengikutsertakan mereka untuk terlibat dalam pembibitan dan penanaman. Untuk 2-3 tahun ke depan tidak menutup kemungkinan penerapan sanksi dilakukan, misalnya kendaraan



seperti truk yang masuk keluar harus membayar retribusi. Begitu juga sanksi bagi pelaku-pelaku usaha atau mikro usaha yang mengambil kayu mangrove (*mangi-mangi*) untuk pembakaran batako, usaha tahu bahkan tiang-tiang bendera menjelang 17 Agustus (hari kemerdekaan RI). Oleh karena itu, pembinaan kesadaran bukan hanya bagi masyarakat tapi juga pelaku usaha.

4. Pemerintah sebagai fasilitator

Menurut Bapak Julian Kambu selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Sorong, dalam pengelolaan kawasan wisata mangrove dilakukan kerja sama antar Dinas Pariwisata Kota Sorong dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Sorong, sehingga dari segi ekologi maupun wisatanya tetap terjaga. Kerja sama juga dilakukan dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan penanaman mangrove dengan tujuan menjaga agar mangrove itu tetap ada. Ke depannya pemerintah berencana melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak perikanan dalam hal ini Sekolah Akademik Kelautan di Kota

Sorong dalam hal pembudidayaan kepiting, udang, dan hewan lainnya yang ada di kawasan mangrove. Begitu juga dengan pemberdayaan masyarakat sekitar dengan melihat peluang bisnis dalam hal pemanfaatan bagian-bagian dari mangrove, selain kayunya, seperti buahnya yang dapat dibuat menjadi sirup, parfum atau juga sabun.

Pemerintah juga telah melakukan upaya-upaya sosialisasi melalui berbagai media massa seperti CWM, RRI, Radar Sorong, maupun berita-berita online lainnya. Selain itu, dilakukan juga pertemuan-pertemuan langsung dengan masyarakat yang ada di sekitar kawasan mangrove untuk melakukan diskusi terkait aktivitas masyarakat yang masih menebang dan mengambil kayu mangrove (*mangi-mangi*). Diskusi ini juga bertujuan untuk mengajak mereka melakukan pembibitan dan penanaman bersama dengan beberapa mitra dan *stakeholder* lainnya seperti Pertamina dan beberapa perusahaan yang juga beroperasi di Kota Sorong. Hal ini juga merupakan program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan



Kehutanan dalam hal melakukan pembibitan dan penanaman. Penyuluhan juga diberikan kepada masyarakat dalam bentuk edukasi tentang pentingnya hutan mangrove sebagai penyerap karbon, salah satunya yang berasal dari asap kendaraan di Kota ini serta mengatasi perubahan iklim yang tidak menentu.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan Objek Wisata Hutan Mangrove Klawalu

A. Faktor pendukung

1. Kerja sama dan promosi

Adanya dukungan dari masyarakat sangat menentukan keberhasilan suatu kegiatan. Dukungan dari masyarakat ini diawali dengan pelepasan tanah adat oleh pemiliknya yaitu Bapak Jonas Malibela. Selanjutnya pelibatan masyarakat atau lebih pada hubungan kerja sama dengan masyarakat memberikan dampak yang positif karena ada masyarakat yang mulai menyadari pentingnya mangrove sehingga merubah perilaku mereka dan ikut bersama menjaga kawasan yang ada (untuk ekologi dan wisata). Masyarakat yang ikut menjaga lebih

didominasi oleh pemuda yang disebut sebagai kelompok sadar wisata yang berasal dari kelurahan Klawalu dan Klasaman. Para pemuda ini telah dibina dan dibimbing untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Sementara itu, petugas khusus yang ditugaskan dari Dinas Pariwisata (staff dinas pariwisata) bertugas untuk menjaga loket penjualan tiket masuk (retribusi) wisata hutan mangrove.

Promosi merupakan upaya untuk lebih mengenalkan hutan mangrove kepada masyarakat, baik di dalam kota Sorong, luar kota Sorong bahkan sampai ke luar negeri. Promosi dilakukan melalui media-media sosial dan juga hotel-hotel yang ada di kota Sorong. Selain itu, hutan mangrove Klawalu Sorong juga sudah beberapa kali dijadikan sebagai lokasi penelitian dan hasilnya juga dipublikasikan sehingga setiap pembaca bisa mengetahui lebih jauh lagi tentang objek wisata tersebut.

2. Daya tarik wisata

Objek wisata hutan mangrove Klawalu Sorong merupakan satu-satunya objek wisata mangrove yang



ada di Kota Sorong. Berdasarkan hasil penelitian dari Naa, Wanggai dan Siburian (2020) disebutkan kawasan tersebut memiliki nilai keindahan yang didominasi oleh ekosistem tanaman mangrove dan ditunjang dengan adanya aksesibilitas, ketersediaan air bersih, serta sarana dan prasarana yang telah dibuat oleh pengelola. Selain itu, pengunjung dapat mengamati fauna atau hewan yang ada serta merasakan kesejukan udara di lokasi tersebut.

3. Sumber daya manusia

Dari segi kualitas maupun kuantitas, ketersediaan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam upaya pengembangan objek wisata ini sudah cukup baik. Perencanaan ke depannya akan melibatkan juga instansi lainnya seperti pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat untuk lebih kuat dalam hal konservasi dan penegakan hukum. Keterlibatan masyarakat juga membantu upaya pengembangan. Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata merupakan kunci mempercepat pencapaian kesejahteraan melalui pengembangan

pariwisata (Salim, Maulany dan Putu Oka, 2020).

4. Tersedianya fasilitas

Tersedianya berbagai fasilitas seperti *tracking* sepeda, gasebo, gapura identitas, ruang ganti/toilet, menara pandang, jalan setapak bagi pejalan kaki, kafe, beberapa spot-spot atau tempat foto, tempat cinderamata, 8 buah *homestay*, tempat parkir, dan tempat memancing merupakan faktor yang dapat mendukung pengembangan lokasi ini ke depannya.

5. Aksesibilitas

Menurut Rijal, Nasri, Ardiansah dan Chairil (2020), potensi pariwisata di suatu daerah atau kawasan harus ditunjang dengan aksesibilitas yang memadai sehingga lokasi tersebut dapat dikunjungi wisatawan.

Kawasan wisata hutan mangrove sangat strategis karena terdapat di tengah-tengah kota sehingga dari segi akses sangat mudah dijangkau oleh masyarakat atau pengunjung. Dari jalan utama menuju ke lokasi wisata hanya berjarak kurang lebih 1,5 km sedangkan dari bandara dapat



ditempuh sekitar 10-15 menit dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4.

B. Faktor penghambat

1. Keterbatasan anggaran

Pengembangan objek wisata mangrove Klawalu hanya mengandalkan anggaran dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yaitu dari dana alokasi khusus untuk pengembangan pembuatan sarana-sarana wisata yang ada di Kota Sorong. Dari bidang lingkungan hidup juga mengalami keterbatasan anggaran. Hal ini berdampak pada upaya sosialisasi, kurangnya papan-papan pengumuman yang bersifat edukasi, belum adanya masyarakat binaan karena terkendala biaya pembibitan, pemeliharaan dan penanaman.

2. Pandemi Covid-19

Penyebaran virus ini dapat dikatakan sebagai faktor penghambat karena berdampak pada aktivitas masyarakat bahkan perkantoran menjadi terganggu yang berimbas pada penurunan pengunjung sejak tahun 2020 karena arahan pemerintah

untuk menutup tempat wisata sementara waktu. Hal ini juga berpengaruh pada pendapatan dari lokasi wisata.

3. Perilaku masyarakat

Perilaku masyarakat disini lebih terlihat pada kegiatan merusak lingkungan seperti penebangan mangrove untuk memenuhi kebutuhan hidup, pengrusakan papan pengumuman, dan membuang sampah sembarangan. Perilaku ini sebenarnya banyak terjadi bahkan juga di daerah-daerah lainnya. Seperti yang dikemukakan oleh Salim, Maulany dan Putu Oka (2020) dalam penelitiannya bahwa salah satu faktor utama penyebab kerusakan mangrove di objek ekowisata tracking mangrove Bungkutoko Sulawesi Tenggara yaitu penebangan pohon yang berlebihan

4. Belum adanya penerapan sanksi

Ketersediaan peraturan yang berisikan sanksi terhadap pelanggaran belum diterapkan karena masih difokuskan pada upaya pembinaan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran.

Sebagai satu-satunya kawasan



mangrove yang dijadikan lokasi ekowisata di Kota Sorong, maka sangat diharapkan pengembangannya terus berlangsung dengan dukungan juga dari Pemerintah pusat, *stakeholder* terkait, dan masyarakat sekitar agar tetap menjaga serta melestarikannya agar generasi di masa mendatang juga dapat merasakan manfaat perlindungan dari mangrove itu sendiri.

KESIMPULAN

Peran pemerintah dalam pengembangan objek wisata mangrove di Klawalu dilakukan melalui perencanaan pariwisata, pembangunan pariwisata, peraturan pariwisata dan adanya tindakan Pemerintah sebagai fasilitator. Dalam pengembangan objek wisata, banyak faktor yang dapat menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung dalam pengembangan objek wisata mangrove Klamalu berupa adanya kerja sama dan upaya promosi, daya tarik wisata, sumber daya manusia, tersedianya fasilitas dan aksesibilitas. Sementara itu, faktor yang menjadi penghambat pengembangan objek wisata mangrove Klamalu berupa keterbatasan anggaran, penurunan pengunjung akibat

penyebaran covid-19 di Indonesia, perilaku masyarakat yang masih merusak lingkungan dan belum adanya penerapan sanksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Harnida dan Tahir M. 2012. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Obyek Wisata Hutan Batu Rammang-Rammang Di Kabupaten Maros. *Jurnal Ilmu Pemerintahan (Otoritas)*, 2 (2), 125-136
- Humas Direktorat Jendral Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia. Siaran Pers 26 Juli 2020 : Hari Mangrove Sedunia, KKP Targetkan Rehabilitasi 200 Ha Lahan Mangrove Di 2020. Jakarta <https://kkp.go.id/artikel/22001-hari-mangrove-sedunia-kkp-targetkan-rehabilitasi-200-ha-lahan-mangrove-di-2020>
- Mudjab S. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Restorasi Hutan Mangrove (Studi Deskriptif Kualitatif Program Partisipasi Masyarakat Melalui Kelompok Tani Sidodadi Maju (KTSM) Desa Banggi Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang). Skripsi. Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi Dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Naa, L., Wanggai, C. B., dan Siburian, R. H. (2020). Potensi Ekowisata Hutan Mangrove Klawalu Kota Sorong Papua Barat. *Median : Jurnal Ilmu Ilmu Eksakta*, 12 (2), 57-64.
- Rijal, S., Nasri, Ardiansah, T., dan



- Chairil, A. (2020). Strategi dan Potensi Pengembangan Ekowisata Rumbia Kabupaten Jeneponto. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*, 12 (1), 1-13.
- Salim, A., Maulany, R. I., dan Putu Oka N. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Kawasan Bungkutoko Sulawesi Tenggara Sebagai Kawasan Ekowisata. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*, 12 (1), 24-38.
- Sondakh V. S., Siti Suhaeni, Lumenta V. (2019). Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Hutan Mangrove Di Desa Tiwoho Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Akulturasi*, 7 (1), 1049-1058.
- Tabalessy R. R. (2014). Pengelolaan Ekosistem Mangrove Di Kota Sorong Provinsi Papua Barat. Tesis. Universitas Sam Ratulangi Program Pascasarjana Manado. https://www.academia.edu/32995324/PENGELOLAAN_EKOSISTEM_MANGROVE_DI_KOTA_SORONG_PROVINSI_PAPUA_BARAT
- Yuliani S. dan Herminasari N. S. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi. *Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan*, 6 (2), 42-53